

Evaluasi Praktek Kerja Lapangan Pada Pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian di Masa Pandemi Covid-19

Dina Indriyanti

Bapelkes Cikarang

Jalan Raya Lemahabang No 1 Cikarang Utara Bekasi

dinaindriyanti26@gmail.com

Abstrak

Penelitian-penelitian sebelumnya banyak membahas tentang manfaat praktek kerja lapangan dalam meningkatkan kemampuan peserta didik dan karyawan perusahaan, akan tetapi penelitian ini fokus menelaah praktek kerja lapangan pada Pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian Ahli yang dilaksanakan secara jarak jauh. Pelatihan JF Sanitarian Ahli dengan metode latihan jarak jauh memenuhi tuntutan kebutuhan pelatihan fungsional sanitarian di masa pandemi, guna meningkatkan kompetensi sanitarian dan menjadi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran penilaian peserta pelatihan terhadap pelaksanaan PKL di instansi unit kerja masing-masing. Upaya ini merupakan dukungan utama dalam melaksanakan kebijakan pelatihan pada masa pandemi, pasca pandemi dan selanjutnya menuju era normal baru. PKL di instansi unit kerja sebagai praktek mandiri mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Bidang Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 yang diterbitkan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan dalam hal ini oleh Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Kemenkes RI. Metode penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa gambaran penilaian peserta terhadap pelaksanaan praktek mandiri PKL, mendukung dalam pencapaian tujuan pelatihan dan sesuai dengan harapan peserta. Kontribusi studi ini memberikan rekomendasi bahwa tetap diperlukan pendamping PKL sebagai pertimbangan untuk perbaikan pelaksanaan PKL pada pelatihan berikutnya.

Kata Kunci: instansi ; solusi : praktek mandiri

Evaluation of FieldWork Practices in Training Functional Position of Sanitarian during the Covid-19 Pandemic

Abstract

Previous studies have discussed many of the benefits of fieldwork practices in improving the ability of students and employees of the company, but this study focused on studying fieldwork practices in one of the remote functional job training, namely Sanitarian Ahli. JF Sanitarian Ahli Training with distance training methods meet the demands of sanitarian functional training needs during the pandemic, in order to improve sanitarian competence and become a requirement for promotion to the position level. This study aims to see an overview of the assessment of trainees on the implementation of PKL in their respective work unit agencies. This effort is the main support in implementing training policies during the pandemic, post-pandemic and then towards the new normal era. PKL in work unit agencies as an independent practice refers to the Guidelines for the Implementation of Health Sector Training During the Covid-19 Pandemic issued by the Health Human Resources Development and Empowerment Agency in this case by the Health HR Training Center of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia. Research methods with a qualitative descriptive approach. The conclusions of this study show that the picture of participant assessment of the implementation of independent practice, supports the achievement of training objectives and is in accordance with participant expectations. The contribution of this study provides recommendations that PKL assistants are still needed as considerations for improving the implementation of PKL in the next training.

Keywords: agencies ; agencies ; solution : independent practice

PENDAHULUAN

Masalah kesehatan masyarakat merupakan masalah kompleks yang berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan lainnya. Kesehatan lingkungan adalah salah satu bagian dari kesehatan yang merupakan ilmu dan seni dalam mencapai keseimbangan antara lingkungan dan manusia, ilmu dan seni dalam pengelolaan lingkungan sehingga dapat tercapai kondisi yang bersih, sehat, nyaman dan aman serta terhindar dari gangguan berbagai macam penyakit.

Untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat dan mencegah penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan serta dalam rangka mendukung pencapaian standar pelayanan minimal kabupaten/kota bidang kesehatan, perlu diselenggarakan pelayanan kesehatan lingkungan oleh Puskesmas. Demikian pun untuk mencapai pemenuhan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan serta melindungi petugas kesehatan, pasien, pengunjung termasuk masyarakat di sekitar rumah sakit dari berbagai macam penyakit dan/atau gangguan kesehatan yang timbul akibat faktor resiko lingkungan perlu diselenggarakan kesehatan lingkungan rumah sakit.

Strategi dalam menyelesaikan masalah kesehatan lingkungan harus melibatkan berbagai aspek baik dari pemerintah, masyarakat, dan berbagai institusi termasuk institusi pendidikan dan pelatihan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Di Puskesmas menyebutkan bahwa Pelayanan Kesehatan Lingkungan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia,

biologi, maupun sosial guna mencegah penyakit dan/atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor risiko lingkungan. (Permenkes, 2015)

Sementara Permenkes Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit menjelaskan bahwa Pengaturan kesehatan lingkungan rumah sakit bertujuan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat bagi rumah sakit. Untuk mendukung penyelenggaraan kesehatan lingkungan rumah sakit diperlukan kebijakan tertulis dan komitmen pimpinan rumah sakit, perencanaan dan organisasi, sumber daya, pelatihan kesehatan lingkungan, pencatatan dan pelaporan dan penilaian kesehatan lingkungan rumah sakit (Permenkes, 2019).

Upaya peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas harus didukung oleh sumber daya manusia kesehatan yang profesional. Kementerian Kesehatan RI telah menetapkan 30 jabatan fungsional kesehatan yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak yang penuh untuk melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan profesinya masing-masing. Jabatan fungsional (JF) adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Salah satu Jabatan Fungsional tersebut adalah JF sanitarian. Jabatan Fungsional Sanitarian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Peraturan Men PAN dan RB No. 13 Tahun 2019 Tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa PNS yang telah diangkat dalam jabatan fungsional, paling lama 3 (tiga) tahun wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional. Pasal 20 ayat (3) Pejabat Fungsional yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus

Pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atas. Tidak ada perubahan terkait regulasi tersebut di masa pandemi, sehingga tetap diperlukan pendidikan dan pelatihan yang dapat menjawab akan kebutuhan pejabat fungsional sanitarian sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut.

Di sisi lain, hingga Januari 2021 pandemi covid-19 masih merupakan masalah kesehatan prioritas di seluruh dunia dengan pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat. Sanitarian sebagai tenaga yang bertanggungjawab terhadap kesehatan lingkungan mempunyai peran yang sangat penting. Kompetensi tenaga sanitarian sangat diperlukan dalam mengendalikan lingkungan di masa pandemi. Kebutuhan akan perlunya peningkatan kompetensi tenaga sanitarian melalui pendidikan dan pelatihan dapat dilihat pada jumlah pendaftar. Pada awal tahun 2021 terdaftar di aplikasi sidiklat Bapelkes Cikarang sebanyak 188 calon peserta pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional sanitarian. Tingginya permintaan pelatihan ini karena Bapelkes Cikarang merupakan balai pelatihan dengan kekhususan kesehatan lingkungan dan sebagai rujukan pelatihan kesehatan lingkungan tingkat nasional.

Merespon kebutuhan pelatihan untuk jabatan fungsional sanitarian tersebut, maka Bapelkes Cikarang menyelenggarakan Pelatihan Jarak Jauh (LJJ) JF Sanitarian Ahli. Sesuai dengan kurikulum pelatihan, pelatihan ini terdiri dari 90 jam pelajaran, 32 jp teori, penugasan 50 jp dan 8 jp praktik mandiri, yang kemudian dikonversi 32 jp teori diberikan secara *synchronus* maya, 50 jp penugasan dikonversi ke dalam 7 jp *asynchronus* kolaboratif di awal setiap mata pelatihan inti, 23 jp pembahasan hasil penugasan secara *synchronus* maya

dan 20 jp penyempurnaan penugasan secara *asynchronus* kolaboratif. (Bapelkes, 2021)

Praktek mandiri sebagai pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilakukan di institusi masing-masing sebagai lokus PKL sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Bidang Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 yang diterbitkan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan dalam hal ini oleh Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Kemenkes RI. (Puslat, 2020)

PKL merupakan salah satu strategi pembelajaran dengan membelajarkan secara bersama - sama kemampuan psikomotorik (keterampilan), pengertian (pengetahuan), dan afektif (sikap). Peserta diharapkan memiliki kemampuan dalam melakukan diagnosis masalah di unit kerja, mengetahui karakteristik sasaran dan dapat memberikan solusi bersama, disesuaikan dengan sumber daya yang ada atau dimiliki oleh instansi. (Bapelkes, 2021)

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan PKL yang lebih baik untuk pelaksanaan pelatihan selanjutnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran penilaian pelaksanaan PKL di instansi /unit kerja dari sisi peserta pelatihan, terhadap tujuan pelatihan.

Maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana penilaian pelaksanaan PKL pada pelatihan JF Sanitarian yang diselenggarakan di instansi unit kerja masing-masing menurut peserta pelatihan.

Sudjana (2005 : 157-158), Praktek Kerja Lapangan/PKL adalah metode dalam pembelajaran yang digunakan dengan tujuan melatih serta meningkatkan kemampuan peserta dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh

untuk dilakukan di kehidupan nyata atau lapangan, pekerjaan, atau tugas yang sebenarnya.

Metode praktik merupakan metode pembelajaran untuk melatih peserta dengan tujuan meningkatkan kemampuan dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang sudah dipelajari.

David A. Jacobsen, Paul Eggen, dan Donald Kauchak (2009 : 203) menjelaskan bahwa metode praktik dibagi menjadi dua yakni metode praktik terbimbing dan praktik mandiri. Praktik terbimbing merupakan metode praktik dalam pembelajaran. Sedangkan praktik mandiri yakni metode pembelajaran dengan memberikan kesempatan pembelajar untuk melakukan praktik secara mandiri. Putri, (2021) menyatakan bahwa salah satu cara untuk pengembangan dan pengendalian mutu keperawatan adalah dengan cara mengembangkan lahan praktik dalam membimbing mahasiswa melalui pembelajaran *blended learning*.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana peneliti ingin mendeskriptifkan keadaan yang diamati di lapangan secara lebih spesifik, transparan dan mendalam hanya pada kelompok yang diteliti (Creswell, 2015). Data utama berupa kata-kata, tindakan, dan dokumen yang dikumpulkan dengan kuesioner dan observasi (Maleong, 2015). Instrumen penelitian utama adalah peneliti sendiri (Sugiyono, 2005). Kuesioner yang digunakan adalah dari penelitian sebelumnya. Data yang terkumpul dianalisis secara logiko-induktif yaitu proses berpikir dengan menggunakan logika untuk memahami pola dan kecenderungan dalam data. Analisis dilakukan melalui tiga tahap yaitu pengkodean, mendeskripsikan karakteristik utama, dan

menginterpretasikan data (Mertler, 2011). Hasil penelitian disajikan secara deskriptif. Penelitian dilakukan pada kelas Pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian Ahli Angkatan 4 tahun 2021 di Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang dengan peserta sebanyak 30 orang.

Keterbatasan penelitian ini adalah hanya memberikan gambaran penilaian dari satu kelompok kelas pelatihan saja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi Covid 19 masih berlangsung dan belum dapat diprediksi akan sampai kapan berakhir. Strategi dalam menyelesaikan permasalahan di bidang kesehatan harus melibatkan berbagai aspek baik pemerintah, masyarakat dan berbagai institusi termasuk institusi penyelenggara pendidikan dan pelatihan bidang kesehatan.

Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang sebagai Lembaga pelatihan bidang kesehatan unit pelaksana teknis pusat berupaya menyelenggarakan pelatihan ini sesuai dengan kurikulum dan pedoman penyelenggaraan pelatihan yang berlaku. Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau Praktik Mandiri pada pelatihan JF Sanitarian Ahli merupakan salah satu proses pembelajaran untuk memberikan pengalaman nyata dalam menyelesaikan permasalahan dengan melakukan persiapan, pengamatan, pengumpulan data, pengolahan data, pelaporan masalah kesehatan lingkungan yang ada di lingkungan sekitar secara mandiri, yang kemudian dituangkan dalam penyusunan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Sanitarian.

Artinya metode praktik sebagai suatu teknik pembelajaran yang memiliki tujuan mengembangkan kemampuan pembelajar dengan menerapkan keterampilan yang telah dimiliki peserta dalam suatu kegiatan nyata, baik dengan metode terbimbing

atau secara mandiri guna mencapai tujuan pembelajaran.

Berikut adalah hasil dan pembahasan penelitian tentang evaluasi pelaksanaan PKL pada pelatihan JF Sanitarian Ahli pada masa pandemi Covid-19 :

Profil Responden

Tabel 1. Karakteristik Peserta Pelatihan JF Sanitarian Ahli Angkatan 8 tahun 2021

Profil	Frekuensi	Prosentase (%)
Umur		
≤ 30 tahun	0	0
30 – 40 tahun	10	33,33
40 – 50 tahun	17	56,66
> 50 tahun	3	10,00
Jumlah	30	100
Jenis Kelamin		
Laki-laki	12	40
Perempuan	18	60
Jumlah	30	100
Pendidikan Terakhir		
D3 sanitarian	18	60
S1 kesehatan lingkungan	10	33,33
D3 lainnya	0	0
S1 lainnya	2	6,66
Jumlah	30	100
Asal Instansi		
KKP	9	30
Dinas Kesehatan	8	26,66
Puskesmas	10	33,33
Rumah Sakit	2	6,66
BBTKLPP	1	3,33
Jumlah	30	100
Riwayat Jabatan Sebelumnya		
Sanitarian	24	80
Perawat	0	0
Bidan	0	0
Struktural	6	20
Jumlah	30	100
Pengalaman Dalam Jabatan		
< 1 tahun	2	6,66
1 – 5 tahun	12	40
5 – 10 tahun	14	46,66
> 10 tahun	2	6,66
Jumlah	30	100

Profil peserta pelatihan akan menjadi pertimbangan dalam melakukan analisis. Peserta dalam hal ini dikelompokkan berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, asal instansi, riwayat jabatan sebelumnya dan pengalaman dalam jabatan. Berdasarkan tabel 1 diketahui hasil distribusi data dari 30 alumni yang diteliti berdasarkan usia, 10 orang (33,33%)

berusia 30 – 40 tahun, yang berusia 40 – 50 tahun sejumlah 17 orang (56,66%), usia >50 tahun 3 orang (10 %) dan tidak ada peserta yang berusia <30 tahun, perempuan 18 orang (60%) dan laki-laki 12 orang (40%), berdasarkan pendidikan, maka yang berpendidikan setingkat D3 Kesehatan Lingkungan sebanyak 18 orang (60%), yang berpendidikan setingkat S1 Kesehatan Lingkungan sebanyak 10 orang (33,33%) dan 2 orang (6,66%) dari S1 lainnya, berdasarkan Riwayat jabatan sebelumnya, sebanyak 24 orang (80%) dalam jabatan fungsional sanitarian, sementara sebanyak 6 orang (20 %) pernah menduduki jabatan struktural, pengalaman dalam jabatan menunjukkan bahwa 12 orang (40%) sudah duduk dalam jabatan selama 1- 5 tahun, 14 orang (46,66%) selama 5-10 tahun dan 2 orang (6,66%) masing-masing menduduki jabatan selama <2 tahun dan >10 tahun,

Sebagian besar peserta pelatihan berusia 40 - 50 tahun, dengan masa pengalaman dalam jabatan sudah memenuhi syarat untuk naik jenjang (5 -10 tahun), sesuai peraturan perundangan yang berlaku seharusnya yang bersangkutan sudah berada pada jenjang ahli. Dari sisi pendidikan hanya 2 orang yang berasal dari sarjana lainnya, namun dasar pendidikan sebelumnya adalah kesehatan lingkungan, artinya secara syarat pendidikan untuk naik ke jenjang ahli sudah terpenuhi. Asal instansi peserta sebagian besar dari puskesmas, sesuai dengan kebutuhan tenaga bahwa fasilitas pelayanan kesehatan inilah yang membutuhkan banyak tenaga sanitarian. Riwayat jabatan sebelumnya sangat memenuhi persyaratan naik jenjang dimana 80% peserta konsisten dalam jabatan sanitarian. 20% yang berasal dari struktural awalnya adalah sanitarian yang karena kebutuhan organisasi melepas sementara jabatan fungsional sanitariannya.

Sanitarian ahli sebagai jabatan fungsional sanitarian keahlian dimana pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah dan memberikan pengajaran secara sistematis di bidang kesehatan lingkungan kepada

masyarakat. Adapun tugas pokok fungsi sanitarian adalah melakukan kegiatan pengamatan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat.

PKL sebagai suatu proses pembelajaran dan pelatihan praktis dalam bidang kompetensi masing-masing, dimaksudkan untuk memberikan pengalaman nyata bagi pembelajar tentang lingkungan kerja, etos dan budaya kerja yang belum tergambar sepenuhnya di pembelajaran teori. Dari pengalaman Praktek Kerja Lapangan diharapkan pembelajar mendapatkan ketrampilan hidup yang akan berguna bagi perkembangan dirinya dimasa yang akan datang.

Berikut adalah panilaian peserta pelatihan tentang praktek kerja lapangan yang sudah dilaksanakan :

Tabel 2. Penilaian Peserta Tentang Metode Praktek Kerja Lapangan yang Dilaksanakan di Instansi

Uraian	Ya	%	Tidak	%
Hasil pembelajaran tercapai	22	73,3	8	26,7
Materi pelatihan sesuai diterapkan di Instansi	20	66,6	10	33,3
Harapan peserta terhadap PKL terpenuhi	20	66,6	10	33,3
Instansi pernah digunakan sebagai lokus PKL	18	60	12	40
Pernah melakukan PKL di instansi	0	0	30	100

Sumber: data primer yang diolah (2022)

Dari tabel 2 dapat dilihat gambaran pelaksanaan praktek lapangan di instansi menurut peserta, dimana terhadap hasil pembelajaran, sebanyak 73,3% peserta berpendapat sudah tercapai, 66,6% peserta menyatakan bahwa materi pelatihan sesuai diterapkan di instansi dan harapan peserta terhadap PKL terpenuhi. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa praktik lapangan (PL) mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas

Islam Lamongan yang merupakan upaya penguatan calon guru sebelum menjadi pendidik profesional dapat terlaksana dengan memuaskan, mulai dari tahap persiapan, pembekalan, dan pembuatan program kerja berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh guru pamong dan dosen pembimbing (Fathurrahman, 2019).

Dan bahwa pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan berbasis pendidik kompetensi keahlian Teknik Audio Video sangat efektif dan bermanfaat dalam mendukung keberhasilan program pendidikan dan pelatihan (Atmawati, 2017). Sejalan juga dengan penelitian yang menyebutkan bahwa model pembelajaran *Project Based Learning* dapat meningkatkan kompetensi pada proses pembelajaran Instalasi Motor Listrik (Eliza, 2019). Bahwa disarankan membuat instrument penilaian proses dan produk yang seimbang dari pra kegiatan, kegiatan dan pasca kegiatan praktek kerja lapangan untuk mengukur keberhasilan program (Munandar, 2020).

Selanjutnya adalah gambaran pendapat peserta tentang hasil praktek kerja lapangan terhadap tujuan pelatihan

Tabel 3. Penilaian Peserta Tentang Hasil Praktek Kerja Lapangan dengan Tujuan Pelatihan

Uraian	Ya	%	Tidak	%
Instansi mendukung pencapaian tujuan PKL dalam pelaksanaan	28	93,3	2	6,7
Instansi mendukung pencapaian tujuan PKL dalam perencanaan	22	73,3	8	26,7
Instansi mendukung pencapaian tujuan PKL dalam monitoring evaluasi	20	66,6	10	33,3
Instansi mendukung pencapaian tujuan PKL dalam mengembangkan teknologi tepat guna	18	60	12	40
Instansi mendukung pencapaian tujuan PKL dalam menyusun DUPAK	16	53,3	14	46,6
Instansi mendukung pencapaian tujuan PKL dalam membuat KTI	11	36,6	19	63,3

Sumber: data primer yang diolah (2022)

Sekaitan dengan pendapat peserta tentang hasil praktek kerja lapangan yang dilaksanakan di instansi terhadap tujuan pelatihan, 93,3% peserta menyatakan bahwa instansi mendukung pencapaian tujuan PKL dalam pelaksanaan sanitasi lingkungan. Instansi yang dinilai mendukung pencapaian tujuan PKL dalam perencanaan sanitasi lingkungan 73,3%, dan yang mendukung pencapaian tujuan PKL dalam monitoring evaluasi sanitasi lingkungan adalah 66,6%.

Siklus perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi merupakan siklus manajemen pengelolaan semua kegiatan, program dan layanan. Kompetensi tenaga sanitarian harus dikembangkan lebih maksimal untuk mendukung mekanisme tersebut agar upaya-upaya yang sudah dan akan dilaksanakan menjadi lebih terencana, terarah, dan terdokumentasi dengan baik sebagai proses yang berkesinambungan (Permenkes, 2016). Hal ini selaras dengan penelitian yang menjelaskan bahwa PKL menunjang kinerja mulai dari tahap persiapan, pembekalan, pembuatan program kerja yang meliputi : pembuatan perangkat pembelajaran, pelaksanaan praktik mengajar, keterlibatan dalam kegiatan ekstra kurikuler, pembelajaran pada bidang layanan khusus dan penilaian (Fathurrahman, 2019).

Sementara 60% instansi memberikan dukungan pencapaian tujuan PKL dalam mengembangkan teknologi tepat guna di bidang sanitasi lingkungan, dan terdapat 53,3% yang mendukung tujuan PKL dalam penyusunan DUPAK jabatan fungsional sanitasi lingkungan dan dukungan terhadap pencapaian tujuan membuat KTI bidang sanitasi lingkungan menurut pendapat peserta adalah 35,6%. Hal ini dapat diartikan sesuai dengan penelitian yang menunjukkan bahwa 91,7% pembelajar menyatakan bahwa kegiatan praktek lapangan sangat efektif dan 8,3% sisanya berpendapat efektif untuk meningkatkan wawasan tentang materi Manajemen Berbasis Sekolah (Gagaramusu, 2014).

Sejalan dengan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa PKL juga mampu

mendorong untuk implementasi teknologi tepat guna dalam menyelesaikan masalah pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga melalui program edukasi pemilahan dan pengelolaan sampah, pelatihan pembuatan kompos dengan metode Takakura, dan pelatihan pembuatan kerajinan sampah non-organik (Arieny, 2014). Didukung oleh hasil penelitian yang menyebutkan bahwa penilaian autentik dapat mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik pada ranah afektif, kognitif dan psikomotor (Rusdiana, 2016)

Kelebihan Praktek Lapangan yang Dilaksanakan di Instansi Peserta

Tabel 4. Penilaian Peserta Tentang Kelebihan Praktek Kerja Lapangan yang Dilaksanakan di Instansi Peserta

Uraian	Jumlah	
	n	%
Efisien dari sisi biaya	14	28,6
PKL bermanfaat bagi peserta pelatihan	12	24,5
Peserta dituntut mandiri	8	16,3
Mudah dijangkau	8	16,3
PKL bermanfaat bagi instansi	4	8,2
PKL menghasilkan upaya perbaikan di instansi	3	6,1
Jumlah	49	100

Sumber: data primer yang diolah (2022)

Penilaian peserta tentang kelebihan praktek kerja lapangan yang dilaksanakan di instansi peserta adalah bahwa PKL yang dilaksanakan di instansi efisien dari sisi biaya, bermanfaat bagi peserta dan instansi, mudah dijangkau karena peserta cukup menemukan kasus di instansinya dan memberikan solusi upaya perbaikan untuk menyelesaikan masalah, sehingga peserta merasa dituntut untuk mandiri. Hal ini didukung oleh penelitian yang menyebutkan bahwa kelebihan pelatihan jarak jauh adalah proses belajar dinilai menjadi lebih lebih produktif karena kegiatan belajarnya bervariasi dan terdokumentasi, fleksibel karena tidak terikat

tempat dan waktu, dan lebih efisien karena banyak anggaran yang dapat dihapuskan, seperti anggaran untuk perjalanan dinas, anggaran makan-minum, dan anggaran alat tulis kantor (Suharsono, 2021)

Dalam pelaksanaannya, peserta pelatihan harus mandiri dalam melaksanakan PKL sampai dengan menghasilkan upaya perbaikan terhadap permasalahan di instansi. Namun karena dari 30 peserta, hanya 21 orang yang berasal dari instansi pelayanan kesehatan seperti puskesmas, Rumah Sakit dan KKP yang memiliki indikator kinerja melaksanakan secara langsung kegiatan-kegiatan sanitasi lingkungan dengan sasaran yang terukur, maka peserta yang berasal dari Dinas Kesehatan dengan tupoksi sebagai Pembina cenderung menarik manfaat PKL dari sisi monitoring dan evaluasi.

Kekurangan Praktek Lapangan yang Dilaksanakan di Instansi Peserta

Hasil wawancara mendalam dengan peserta diketahui, terdapat 6 (enam) kekurangan praktek lapangan yang dilaksanakan di instansi peserta, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 5. Penilaian Peserta Tentang Kekurangan Praktek Lapangan yang Dilaksanakan di Instansi Peserta

Uraian	Jumlah	
	n	%
Supporting jaringan internet belum menunjang	20	66,6
Instansi tidak memberikan pengalaman baru	15	32
Instansi belum sesuai standart	12	25,5
Atasan tetap memberikan penugasan meskipun sedang pelatihan	10	21,3
Rekan kerja tetap melibatkan dalam pekerjaan, meskipun sedang pelatihan	8	17
Laporan tidak maksimal	2	4,2
Jumlah	47	100

Sumber: data primer yang diolah (2022)

Didukung oleh pernyataan pimpinan instansi A (Koordinator Bidang SKK KKP Tanjungpriok) yang menyatakan bahwa “dengan adanya penyelenggaraan PKL di unit kerja, maka mau tidak mau, suka tidak suka kantor harus mengupayakan perbaikan beberapa titik pelayanan yang belum memenuhi syarat atau belum sesuai standart”.

Sehingga terkait ketidak sesuaian dengan standart, kondisi ini dapat dipahami sebagai semangat perbaikan dan perubahan bagi instansi agar selalu berbenah memperbaiki diri terhadap kondisi ideal dan standart.

Dari sisi peserta, memang terdapat peningkatan anggaran penggunaan kuota internet untuk menunjang pelaksanaan PKL yang mana pada sesi ujian hasil PKL diperlukan dukungan akses internet yang stabil. Pada akhirnya beberapa peserta dapat dipertimbangkan difasilitasi oleh masing-masing unit kerja atau menggunakan jaringan internet kantor karena pelatihan merupakan pekerjaan dinas.

Peserta juga ada yang berpendapat bahwa meskipun sedang mengikuti pelatihan, atasan tetap saja memberikan penugasan-penugasan, dan pendapat lain menyatakan bahwa rekan kerja tetap melibatkan dalam melaksanakan pekerjaan. Hal ini sudah barang tentu untuk menjadi perhatian semua pihak bahwa sesuai dengan pakta integritas dukungan pimpinan terhadap peningkatan kompetensi stafnya, maka pembebastugasan pada periode pelatihan menjadi mutlak, dan harus disampaikan juga kepada staf lain.

Saran perbaikan agar Praktek Lapangan yang Dilaksanakan di Instansi Menjadi Lebih Baik

22 peserta (73,3%) menyarankan adanya pendamping dalam pelaksanaan PKL di instansi. Saran ini perlu dipertimbangkan untuk perencanaan pelatihan selanjutnya dengan merencanakan adanya pendamping PKL sebagaimana pelaksanaan PKL pada pelatihan klasikal . Pendamping bisa berasal dari Bapelkes, atasan langsung atau instansi pembina peserta pelatihan, karena hal ini

sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menghasilkan kesimpulan bahwa Praktek Lapangan Kependidikan, tak lepas dari peranan dosen micro teaching dalam menyampaikan materi, membimbing, dan mengevaluasi, serta pelaksanaan pengajaran dan pelaksanaan praktek lapangan kependidikan itu sendiri. Hal inilah yang mendukung keberhasilan pelaksanaan praktek lapangan kependidikan (Anifah, 2019).

20 peserta berpendapat agar PKL dapat dilaksanakan di unit instansi yang pelayanannya sudah baik. Hal ini tentu sangat sesuai dengan tujuan PKL yaitu untuk mendapatkan pengalaman kerja yang sesuai tujuan pembelajaran. Hal ini sebagaimana tampak dalam laporan D (Pendamping PKL), yang menyatakan bahwa, "Pendamping PKL sangat berperan dalam mengarahkan peserta pelatihan mulai dari menentukan masalah prioritas, melakukan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan memfasilitasi komunikasi dengan pimpinan dalam menyelesaikan masalah, evaluasi sampai tahap penyusunan laporannya".

Semua saran perbaikan untuk penyelenggaraan PKL yang lebih baik, disajikan pada tabel 6 berikut ini :

Tabel 6. Saran Perbaikan terhadap pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan yang dilaksanakan di instansi

Uraian	Σ	%
Ada pendamping PKL yang ditunjuk oleh penyelenggara	22	73,3
PKL dilaksanakan di instansi yang pelayanannya sudah baik	20	66,6
Rekomendasi hasil PKL agar ditindaklanjuti	18	60
Agar diperkaya dengan video pembelajaran/tutorial PKL	16	53,3
Instansi harus menerapkan pelayanan yang ideal sebagai lokus PKL	14	46,6
Pimpinan dan rekan kerja agar dilibatkan dalam penyajian hasil PKL	11	36,6

Sumber: data primer yang diolah (2022)

Terdapat 18 peserta yang mengusulkan bahwa rekomendasi hasil PKL agar ditindaklanjuti. Hal ini diupayakan dengan penyelenggara yang mengirimkan laporan hasil PKL ke masing-masing instansi. 16 peserta berpendapat agar metode pembelajaran diperkaya dengan video pembelajaran/tutorial PKL, merupakan saran masukan yang sangat membangun dan ditindaklanjuti dengan pelibatan jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran/PTP untuk mendukung pelaksanaan pelatihan selanjutnya sebagaimana disampaikan oleh A (Koordinator Pelatihan JF Bapelkes Cikarang) yang menyampaikan bahwa, "Sejalan dengan beberapa masukan dari peserta terkait kebutuhan video pembelajaran, maka kami menyampaikan hal dimaksud kepada pimpinan dan ditindaklanjuti dengan mengoptimalkan tugas fungsi PTP".

14 peserta menyampaikan saran terhadap instansinya untuk menerapkan pelayanan yang ideal sebagai lokus PKL. Panitia berkomitmen untuk menyampaikan hasil ujian dan rekomendasi PKL kepada unit instansi asal peserta. Kondisi ini akan berjalan seiring dengan seringnya instansi digunakan sebagai lahan PKL. Harapannya semua instansi memperbaiki diri menyesuaikan dengan regulasi dan standart yang ditetapkan.

Terhadap keterlibatan pimpinan dan rekan kerja dalam penyajian hasil PKL, 11 peserta berpendapat agar melibatkan pimpinan dan rekan kerja. Upaya ini dapat dipertimbangkan sebagai upaya perbaikan bagi pelatihan selanjutnya

PENUTUP Simpulan

Bapelkes Cikarang menyelenggarakan Pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian Ahli pada masa pandemi secara jarak jauh dengan PKL menerapkan metode praktek mandiri di instansi masing-masing peserta. Pelatihan di angkatan 4 tahun 2022 diikuti 30 peserta memberikan gambaran sebaran asal instansi dari Puskesmas, Rumah Sakit, KKP, BPTKL dan Dinas Kesehatan. Pelaksanaan PKL dinilai sudah dapat mencapai tujuan pembelajaran

dan sesuai dengan harapan peserta. Terhadap tujuan pembelajaran dalam pelatihan, peserta menyatakan bahwa instansi mendukung pencapaian tujuan menyusun perencanaan, melaksanakan evaluasi sanitasi lingkungan, pengembangan teknologi tepat guna, menyusun DUPAK dan membuat KTI bidang kesehatan lingkungan.

PKL pada pelatihan JF Sanitarian Ahli memiliki kelebihan yaitu dinilai lebih efisien dari sisi biaya, lebih mudah dijangkau dari sisi lokasi dan memberikan manfaat langsung dalam penyelesaian masalah di unit instansi. Sedangkan kelemahan PKL pada pelatihan di instansi adalah instansi tidak memberikan pengalaman baru bagi peserta, lokus PKL belum memberikan pelayanan yang sesuai standart ideal, atasan tetap memberikan penugasan meskipun sedang PKL.

Agar pelatihan ini menjadi lebih baik peserta menyarankan pada saat pelaksanaan PKL didampingi oleh pendamping PKL, lokus PKL menggunakan lahan yang ideal dan memenuhi standart pelayanan, rekomendasi dari pelaksanaan PKL harus ditindaklanjuti dan agar diperkaya dengan video pembelajaran /tutorial PKL, serta melibatkan pimpinan dalam penyajian hasil pelaksanaan PKL.

Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan direkomendasikan agar Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang sebagai penyelenggara Pelatihan Jarak Jauh melaksanakan Pelatihan JF Sanitarian Ahli secara *blended learning* demi menjamin pelaksanaan PKL menjadi lebih efektif di lokasi terpilih yang memenuhi standart pelayanan kesehatan lingkungan.

Terhadap keterbatasan penelitian ini maka perlu dilanjutkan dengan penelitian terkait kinerja dan karier pejabat fungsional sanitarian pasca pelatihan .

DAFTAR PUSTAKA

Anifah, U. (2019). Peranan Mata Kuliah Micro teaching Terhadap Pelaksanaan Praktek Lapangan Kependidikan Bidang Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi. Jurnal Sport Science.

- Arieny, N. N. (2017). Laporan PKL FKM Universitas Airlangga. Surabaya.
- Atmawati, A. (2017). Keefektifan Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan Berbasis Industri pada Kompetensi Keahlian Teknik Audio Video. Journal of Vocational and Career Education.
- Bapelkes. (2021). Kerangka Acuan Kegiatan Pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian Ahli .
- Eliza, F. (2019). Peningkatan Kompetensi Psikomotor Siswa Melalui Model Pembelajaran Project Based Learning (PjBL) di SMKN 5 Padang. INVOTEK: Jurnal Inovasi Vokasional dan Teknologi.
- Fathurrahman, F. (2019). Implementasi Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Islam Lamongan. Jurnal Reforma, 10.30736/rfma.v7i2.80
- Gagaramusu, Y. (2014). Persepsi Mahasiswa Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Praktek Lapangan Mata Kuliah Manajemen Berbasis Sekolah. jurnal ilmiah.
- Hamzah B. Uno. (2008). Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Kreatif dan Efektif. Jakarta: Bumi Aksara.
- Munandar, A. (2020). Praktek Kuliah Lapangan/Kuliah Kerja Lapangan di Perguruan Tinggi (Survey Pendapat di UNJ dan UPI). Parameter: Jurnal Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.
- Permenkes. (2015). Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas
- Permenkes. (2016). Pedoman Manajemen Puskesmas.
- Permenkes. (2019). Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
- Puslat. (2020). Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Bidang Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19.
- Putri, S. T. (2021). Pelatihan Preceptorship Bagi Clinical Instructor Keperawatan.
- Rusdiana, H. (2016). Evaluasi Hasil Belajar Menggunakan Penilaian Autentik Pada Mata Pelajaran Kelistrikan Sistem Refrigerasi.
- Suharsono, A. (2021). Implementasi Kebijakan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Secara Jarak Jauh Di Kementerian Keuangan . Jurnal Kebijakan Pembangunan

